

**UPAYA UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU (TIPIDTER) DALAM
MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



OLEH:

HELENA YOSEFANI K. HAYON

NPM : 21160099

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIMOR
KEFAMENANU
2021**

**PERNYATAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya mengatakan dengan sebenar - benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam penulisan skripsi ini dengan judul " UPAYA UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU (TIPIDTER) DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA" tidak terdapat karya ilmiah yang tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka. Apabila dalam naskah skripsi ini didapat atau dibuktikan terdapat unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik saya peroleh strata satu (1) dengan gelar S.Ip dibatalkan, serta diproses dengan peraturan atau perundang - undangan yang berlaku (Undang - undang nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Kefamenanu, September 2021

Mahasiswa



Nama : Helena Y.K. Hayon

NPM : 21160099

Prodi : Ilmu Pemerintahan


LEMBARAN PERSETUJUAN

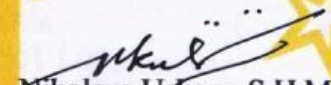
**"UPAYA UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU (TIPIDTER) DALAM
MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA"**

Telah dipertanggung jawabkan dan disahkan didepan dewan penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Pemerintahan universitas Negeri Timor pada Hari Kamis,
Tanggal 29, Bulan Juni Tahun 2021.

OLEH
PEMBIBING UTAMA

PEMBIBING PENDAMPING


Dian Festianto, S.Ip.Ma
NIP 19721231005011004


Nikolaus Uskonu, S.H.M.Hum.
NI PPPK : 19630418202121001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Timor


Dr. Drs. Elbins Kalembang, M.Si
NIP : 19630911 2001305 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

"UPAYA UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU (TIPIDTER) DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA"

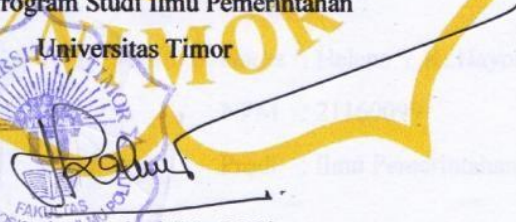
Telah dipertanggung jawabkan dan disahkan didepan dewan penguji Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan universitas Negeri Timor pada Hari Kamis, tanggal 29, Bulan Juni Tahun 2021.

Susuna Dewan Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Medan Y. Mael S.Ip.M.Si NIP : 19740612 200501 1 001	
Sekretaris	: Dian Festianto, S.Ip.Ma NIP 19711013 200501 1 001	
Anggota	: Nikolaus Uskonu, S.H.M.Hum. NI PPPK : 19630418 202121 1 001	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Timor


Yakobos Kolnel, S.Ip.M.Si.
NIP : 1980010228 202121 1 003

MOTTO

**TIDAK ADA YANG TERLALU CEPAT ATAU
TERLAMBAT.**

ALLAH TELAH MENGATURNYA DENGAN TEPAT

(HELENA Y.K. HAYON)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa, yang telah memimpin perjalanan pendidikan dari awal perkuliahan sampai pada akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, yakni Bapak Dr Hayon G. Nico, M.hum dan Ibu Agnes o. Dawan yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa pamrih, penuh harap dan bangga ketika Penulis menekuni Ilmu di fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri timor.
3. Kakak Gabriel P.S. Hayon, S.Km, Adik Aloysia serfarisi P. Hayon, Adik Forluratus G.w.d. Hayon
4. Keluarga Besar Hayon dan Dawan.
5. Sahabat di Kepolisian angkatan 39.
6. Seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Negeri Timor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"UPAYA UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU (TIPIDTER) DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA"** tahun 2021. Skripsi ini tidak hadir begitu saja karena masih menjadi coretan tinta yang tak bermakna, namun atas sentuhan tangan maupun pikiran, tenaga dan waktu memulai bimbingan serta petunjuk yang tulus tanpa mengenal lelah dari pembimbing sejak permulaan sampai dengan terselesainya Skripsi ini.

Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Elpius Kalembang M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor .
2. Bapak Yakobus Kolne S.Ip.M.si, selaku ketua progrm studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Dian Festianto,S.Ip.Ma selaku pembimbing I, atas segala bantuan kepada penulis, dengan rela dan tulus hati telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis guna terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Nikolaus Uskono,S.H.M.Hum, selaku pembimbing II atas segala bantuan kepada penulis, dengan rela dan tulus hati telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis guna terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Medan Y. Mael S.Ip.Msi, selaku penguji utama atas segala bantuan kepada penulis, dengan rela dan tulus hati telah meluangkan waktu untuk memberi masukan penulis guna terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negegri Timor, Prodi Ilmu pemerintahan yang telah membekali penulis dengan bimbingan dan ilmu pengetahuan dalam proses penulisan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari sisi *content* maupun sistematika. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kewenangan Kepolisian Resort Timor tengah Utara dalam upaya unit tindak pidana tertentu (tipidter) dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang di wilayah kabupaten timor tengah utara.

Kupang, September 2021

Penulis

Helena Yosefani K. Hayon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
Abstrack.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN 1	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permusan Masalah	10
1.3. Tujuan penelitian.....	10
1.4. Manfaat penelitian.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

A. Deskripsi Teori

2.1.1. Upaya Penanggulangan.....	12
2.1.2. Unit Tindak Pidana Tertentu	17
A. Selayang Pandang Satuan Resers kriminal.....	17
B. Unit Tindak Pidana Tertentu	19
2.1.3. Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan	23
2.1.4. Tindak Pidana.....	26
2.1.5. Perdagangan Orang	33
2.1.6. Upaya Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 42	
2.2. Kerangka pikir.....	53

BAB III METODE PENELITIAN..... 59

3.1 Jenis Penelitian.....	59
3.2. Populasi, sampel, dan Informasi	60
3.3.Defenisi konsepsional	61
3.4.Defenisi Oprasional.....	62
3.5.Jenis, Sumber dan teknik penumpulan data	63
3.6. Pengolahan dan analisis data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN	67
4.1. Data objek penelitian.....	67
4.1.1. Deskripsi wilayah penelitian	67
a. Keadaan Geografis	67
b. Batas wilayah	67
c. Luas Wilayah Hukum Polres TTU (Unit Tindak Pidana Tertentu)	68
4.1.2. Unit tindak pidana Tertentu.....	69
4.2. Data Fokus penelitian.....	73
4.2.1 Upaya penggulungan kejahatan.....	73
4.2.2. Perdagangan orang	75
4.2.3. Faktor Tindak pidana perdagangan orang	79
4.2.4. Upaya Unit tindak Pidana tertentu dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang di wilayah kabupaten Timor Tengah	84
4.2.5. Kendala menghadapi tindak pidana perdagangan orang	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Laporan Data Kasus Tindak Pidana Orang Tahun 2019 S/D 2021	6
2. Pelaksana Pekerja Antar Daerah (Akad) Yang Beroperasi Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utaratahun 2020 S/D 2021	8
3. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Khusus	29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. 2.2 Kerangka Berpikir	53
2. Struktur Organisasi.....	71

**UPAYA UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU (TIPIDTER) DALAM
MENGATASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Helena Yosefani K. Hayon,²¹¹⁶⁰⁰⁹⁹, Dian Festianto,^{S.Ip.,MA²}, Nikolaus Uskono,^{S.H.M.Hum³},Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Timor .Email : HayonHenny@gmail.com

UNIVERSITAS TIMOR

ABSTRAK

Dalam Proses Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang, Unit Tindak Pidana Tertentu berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang. Agar nantinya dalam pelaksanaan Tugas Tidak terjadi tumpang tindih, sehingga baik dari Pihak Kepolisian dan pemerinth dapat menjalankan Tugasnya secara lebih efektif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejauh mana Upaya Unit Tindak Pidana Tertentu dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan orang diwilayah Kabupaten TTU. Metode Yang Digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data hasil Observasi dan Wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan menggambarkan bahwa dalam Upaya mengatasi Tindak Pidana Perdagangan orang berjalan dengan baik Namun masih ditemukannya Kasus Perdagangan orang. Kesimpulan dari Hasil Penelitian Ini adalah sebagai berikut Unit Tindak Pidana Tertentu polres Timor Tengah Utara mengimplementasikan kewenangannya dalam Pencegahan maupun Penegakan Hukum bagi tindak pidana perdagang orang melaluiUpaya Pre-Emtif, Upaya preventif, Upaya Represif. saran yang dibangun berdasarkanhasil kesimpulan diatas adalah1) Meskipun unit Tindak Pidana Tertentu memiliki kewenangan dalam mencegah dan penegakan hukum dan telah mengimplementasikannya melalui Upaya Pre-Emtif upaya preventif maupun represif, namun Tindak Pidana Perdagangan Orang masih saja dilakukan.2) Implementasi kewenangan Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Timor Tengah Utara dalam Penegakan Hukum bagi Tindak Pidana Perdagangan orang perlu diperluas dengan meningkatkan peranan.3) perlu di tingkatkan SDM dari Pihak Kepolisian.

kata kunci : Unit Tindak Pidana Tertentu, perdagangan orang, kabupate, Timor Tengah utara.

THE EFFORT OF CERTAIN UNIT OF CRIMINAL ACT IN OVERCOMING THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING IN THE REGION OF SOUTH CENTRAL TIMOR REGENCY

ABSTRACT

In the process of preventing criminal act of human trafficking, certain unit of criminal act is guided by the constitution of the republic Indonesia number 21 Of 2007 about the eradication of criminal act of human trafficking. In doing the duty, it is hoped that there will be no overlap between the police and the government so that the duty will be carried out more effective. The aim of this research is to know how far the effort of certain unit of criminal act in overcoming the criminal act of human trafficking in the region of north Central Timor Regency. The method employed in this research is the technique of collecting the data of observation and interview result. The obtained research result in the field shows that in effort to overcome the criminal act of human trafficking is going on well but it is found the case of human trafficking. The conclusion of the research result is as follows. Certain unit of criminal act in police station of North Central Timor implements its authority in both prevention and law enforcement for criminal act of human trafficking through the effort of preemitive, prefentive, and represive. The suggestions given based on the conclusion result above are 1) Although certain unit of criminal act has the authority in prevention and law enforcement and has implemented through the efforts of preemitive, prefentive, and represive yet criminal act of human trafficking is still done. 2) The authority implementation of certain unit of criminal act in police station of north Central Timor Regency in law enforcement for criminal act of human trafficking is needed to be expanded the roles. 3) It is necessary to increase the police human resources.

The Key Words: certain unit of criminal act, human trafficking, regency, North Central Timor.